



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 15201-15210

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penerapan PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran dan Nomor 04 Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Indah Ramadhani Amir, Muhammad Isra Chikah Arfah, Hasliah, Adriani, Melya

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar

indah@stie-lpi.ac.id, isra@stie-lpi.ac.id, hasliah@stie-lpi.ac.id, adriani@stie-lpi.ac.id, arfitamelya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran dan Nomor 04 Catatan Atas Laporan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terkait. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Dan Nomor 04 Catatan Atas laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan laporan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, termasuk PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran dan Nomor 04 Catatan Atas laporan Keuangan dan mencakup informasi penting yang dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya. Dinas ini telah menyusun LRA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan PSAP No. 02 laporan realisasi anggaran yang disajikan mencakup informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya. Meskipun LRA disusun dengan baik dan tepat waktu, dinas ini menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakcapaian pendapatan daerah dan belanja yang tidak terealisasi, yang berdampak dalam proses penyusunan laporan. Penerapan PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya untuk menyusun CALK dengan baik dan pedoman yang ditetapkan. Namun, masih menghadapi tantangan seperti ketidakcapaian pendapatan, belanja yang tidak terealisasi, dan perbedaan pendapat dalam penyusunan CALK.

Kata kunci: PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran, Nomor 04 Catatan Atas laporan Keuangan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

1. Latar Belakang

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kompleksitas pengelolaan anggaran dan pencatatan keuangan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan menuntut suatu sistem pelaporan yang akurat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

PSAP Nomor 02 memberikan tatacara penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjelaskan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, pembiayaan, dan belanja. Dan untuk PSAP Nomor 04 fokus pada sistem pencatatan yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal dan dapat di pertanggung jawabkan. Kedua PSAP ini memiliki makna yang sangat penting dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Namun penerapan kedua standar akuntansi ini seringkali mendapatkan tantangan, seperti kelemahan sistem pencatatan, kompleksitas regulasi, dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif mengenai penerapan PSAP Nomor 02 dan Nomor 04 di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sangat penting untuk di lakukan.

Penerapan PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran dan Nomor 04 Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Penerapan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan PSAP Nomor 04 tentang sistem pencatatan atas Laporan Keuangan memiliki peran strategis dalam memberikan transparansi penuh terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah, menciptakan mekanisme kontrol yang efektif terhadap penyimpangan keuangan, mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dan menyediakan basis data keuangan yang komprehensif dan dapat di pertanggung jawabkan.

PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan/instansi. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membantu atau mengambil keputusan. (Nendher et al., 2022)

2. Metode

1. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah:

- a. Data Primer. Data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah Shandi (2020). Dalam penelitian ini data primer merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Data Sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen (Shandi, 2020). Data sekunder diperoleh dari perusahaan yaitu berupa bukti transaksi, data biaya produksi, dan lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara Wawancara dan Dokumentasi

3. Teknik Analisis Data

Menurut miles dari Huberman (Sari et., 2028), analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi data, adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi, Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian, Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya.
- b. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain, Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data.
- c. Penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Wawancara

Wawancara oleh ibu Sitti Hasniah, S.P., M. (Kasubang Keuangan)

1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan? Khususnya di LRA!

Jawaban:

“Proses penyusunan LRA itu ada beberapa tahap yang pertama yaitu : Penyusunan APBD sebagai dasar pelaporan, Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran selama periode anggaran, Pengumpulan data realisasi anggaran dari semua bidang, Verifikasi data realisasi anggaran oleh bagian keuangan, Penyusunan laporan realisasi anggaran sesuai format yang di tentukan, pengesahan laporan oleh Kepala Dinas, dan yang terakhir pengiriman laporan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).”

2. Berapakah LRA di sajikan dalam setahun dan butuh berapa lama untuk menyajikan?

Jawaban:

“LRA disajikan selama satu tahun sekali yaitu pada bulan Maret. Realisasi Anggaran disajikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, artinya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sudah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan PSAP No. 02”

3. Metode apa yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk Menyusun Laporan Realisasi Anggaran?

Jawaban:

“Menggunakan metode penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan umumnya mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku, seperti SAP PP Nomor 71 Tahun 2010.”

Wawancara Bapak Nur Akib Putera Khair, SE. (Staff Non-ASN)

1. Bagaimana LRA berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban?

Jawaban:

“akuntansi anggaran di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan digunakan untuk alat pertanggungjawaban dan membantu dalam pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diselenggarakan pada saat anggaran tersebut disahkan dan anggaran dialokasikan.”

2. Apakah terdapat kendala dalam proses penyusunan LRA? Jika ada jelaskan!

Jawaban:

“ya ada, karena pendapatan daerah yang tidak tercapai dan kebanyakan di tahun 2023 belanja yang tidak terealisasi. Selain itu juga terdapat kendala seperti proses SPD terlambat melakukan pelaporan”

3. Apakah selama penyusunan LRA dari dua periode terealisasi sesuai anggran? Jika tidak jelaskan!

Jawaban:

“ tidak, karena karena pendapatan daerah yang tidak tercapai dan kebanyakan di tahun 2023 belanja yang tidak terealisasi”

Wawancara Bapak Aryanto, S.Sos (Penelaah Teknis Kebijakan)

1. Bagaiman koordinasi antar bidang pada Dinas Kebudayaan Dan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban:

“Dinas biasanya mengadakan rapat rutin antar bidang, di mana setiap bidang dapat melaporkan perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan CALK.”

2. Apa langkah-langkah untuk memastikan bahwa informasi yang di sajikan dalam CALK akurat dan relevan?

Jawaban:

“untuk meemastikan kepastian bahwa informasi yang di sajikan CALK akurat dan relevan di butuhkan langkah-langkah yang sangat penting sahingga menghasilkan informasi yang akurat dan relevan seperti, menerapkan kebijakan akuntansi yang jelas dan konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan, melakukan verifikasi data secara menyeluruh sebelum informasi dimasukkan ke dalam CALK, Pelatihan dan pengembangan kapasitas staf juga sangat penting.”

3. Apa tantangan yang di hadapi dalam menerapkan CALK?

Jawaban:

“Penerapan (CALK) di Disbudpar tantangannya adalah pengelolaan dana hibah dan kegiatan pariwisata, yang membuat penyusunan laporan menjadi lebih rumit, kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan publik menjadi tantangan tersendiri, dan anggaran juga menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan CALK sehingga bisa menghambat kegiatan seperti pelatihan pegawai.”

Wawancara Ibu Asriani, SE (Staff Non-ASN)

1. Bagaimana menangani perbedaan pendapat atau ketidak sesuaian data dalam penyusunan Calk?

Jawaban:

“jika terdapat perbedaan maka perlunya mencari tahu dari mana perbedaan pendapat atau data yang tidak cocok itu berasal. Apakah karena cara pandang yang berbeda?, metode pengumpulan data yang tidak sama, atau faktor lain. Setelah itu, penting untuk mengajak semua pihak yang terlibat, seperti tim keuangan dan auditor, untuk berdiskusi bersama. Dalam diskusi ini, bisa saling menjelaskan pandangan masing-masing dan mencari titik temu. Menggunakan data yang akurat dan merujuk pada peraturan yang jelas juga sangat membantu untuk mendukung argumen masing-masing. Selain itu, mencatat semua proses dan keputusan dengan baik akan membuat semuanya lebih transparan dan dapat dipercaya. Jika masih ada perbedaan yang sulit diselesaikan, maka dari itu boleh meminta pendapat dari pihak ketiga yang netral.”

2. Dokumen apa saja yang di perlukan untuk menyusun CALK?

Jawaban:

“ada beberapa dokumen yang di prlukan untuk menyusun CALK seperti Laporan Keuangan, Buku pembantu dan Jurnal, dan Dokumen Pendukung Transaksi”

b. Penerapan PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sudah menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode anggaran dan juga dibandingkan dengan realisasi anggaran ditahun sebelumnya.

Di dalam PSAP No. 02 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dengan menggunakan metode penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan umumnya mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku, seperti SAP PP Nomor 71 Tahun 2010. Begitupun dengan di Disbudpar Sulsel juga menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selama satu tahun sekali. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Hasniah selaku

Kepala sub. Bagian Keuangan bahwa LRA disajikan selama satu tahun sekali yaitu pada bulan Maret (sumber: CaLK, 2024). Sedangkan di dalam PSAP No. 02 menyebutkan kalau Laporan Realisasi Anggaran disajikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, artinya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sudah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan PSAP No. 02. Berikut merupakan proses penyusunan LRA dan pelaporan CaLK pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan :

c. Fungsi PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai alat pertanggungjawaban

Dalam PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Akib selaku Staf yang mengelola LRA menyatakan bahwa akuntansi anggaran di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan digunakan untuk alat pertanggungjawaban dan membantu dalam pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diselenggarakan pada saat anggaran tersebut disahkan dan anggaran dialokasikan.

d. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023-2024

Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri terkait dengan kodifikasi bagan akun standar. Hal tersebut di jelaskan pada data yang dikirim oleh Bapak akib selaku staf pengelola LRA di mulai dari pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggran (SiLPA/SiKPA).

Tabel 1. Pendapatan-LRA Tahun 2023-2024

TA 2023			TA 2024		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
351.000.000,00	395.675.201,00	112,73	369.000.000,00	526.295.567,00	142,63

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Tahun 2023 Pendapatan Daerah yang direncanakan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata sebesar Rp. 351.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 395.675.201,00 atau 112,73%, dan pada tahun 2024 Pendapatan Daerah yang direncanakan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata sebesar Rp. 369.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. (526.295.567,00) atau 142,63%, Realisasi Pendapatan Daerah T.A. 2024 naik dari realisasi T.A. 2023. Realisasi Pendapatan Daerah T.A. 2024 naik dari realisasi T.A. 2023 Pendapatan Daerah dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah T.A. 2024 naik dari realisasi T.A. 2023 Pendapatan Daerah

	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2024	Tahun 2023
	Retribusi Jasa Usaha		
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	186.400.000,00
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	191.870.000,00	179.205.000,00
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Lain – lain PAD yang Sah	327.900.000,00	0,00
	- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.525.567,00	27.691.905,00
	- Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.378.296,00
Jumlah		526.295.567,00	395.675.201,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 3. Belanja Tahun 2023-2024

TA 2023		TA 2024	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
42.055.669.058,00	36.676.308.986,00	42.662.547.039,00	41.842.419.683,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 42.055.669.058,00 sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 36.676.308.986,00 atau 87,21% yang berarti terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.379.360.072,00, dan Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 42.662.547.039,00 sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp. 41.842.419.683,00 atau 98,08 % yang berarti terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 820.127.356,00, Realisasi Belanja Daerah T.A. 2024 naik dari realisasi T.A. 2023. Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari :

Tabel 4. Rincian Dan Penjelasan Pos Belanja Daerah

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Belanja Operasi	41.556.398.683,00	36.603.108.986,00
2.	Belanja Modal	286.021.000,00	73.200.000,00
Jumlah		41.842.419.683,00	36.676.308.986,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 5. Pendapatan-LO Tahun 2023-2024

Realisasi		Kenaikan/Penurunan
Tahun 2024	Tahun 2023	
526.295.567,00	395.675.201,00	130.620.366,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Pendapatan Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 526.295.567,00 pendapatan dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel 6. Pendapatan Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2024	Tahun 2023
	Pendapatan Asli Daerah		
	Pendapatan Retribusi Daerah	519.770.000,00	365.605.000,00
1.	Lain-lain PAD yang Sah	6.525.567,00	30.070.201,00
2.			
Jumlah		526.295.567,00	395.675.201,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Pendapatan – LO pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 369.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp. 526.295.567,00 atau 142,63% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 157.295.567,00. Realisasi TA. 2024 terjadi kenaikan Rp. 526.295.567,00 atau 142,63 % dari realisasi TA. 2023 sebesar Rp. 395.675.201,00 sekitar 130.620.366,00 atau 133,01 %. Dimana *Pendapatan Retribusi Daerah – LO* terjadi kenaikan Rp. 519.770.000,00 dari realisasi TA.2023 sebesar Rp. 365.605.000,00 sekitar Rp. 154.165.000,00 atau 142,17 %, ini disebabkan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (Tanda

Masuk Museum Lagaligo sebesar Rp. 172.000.000,00 atau 101,18 % (mencapai target PAD yang di anggarkan sebesar Rp. 170.000.000,00), ada pun Retribusi Tanda Masuk Museum Mandala realisasi sebesar Rp. 16.070.000,00 dan Retribusi Parkir Societeit De Harmonie (Gedung Kesenian) realisasi sebesar Rp. 3.800.000,00 dimana Retribusi tersebut mendongkrak targetnya Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Pelataran Monumen Mandala sebesar Rp. 105.000.000,00 atau 194,44% (melebihi target PAD yang di anggarkan sebesar Rp. 54.000.000,00), Gedung Mulo Mini Hall Rp. 100.000.000,00 atau 142,86% (melebihi target PAD yang di anggarkan sebesar Rp. 70.000.000,00), Baruga Cokelat Monumen Mandala sebesar Rp. 42.000.000,00 atau 420,00 % (melebihi target PAD yang di anggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00), Baruga Benteng Somba Opu sebesar Rp. 41.400.000,00 atau 103,50 % (melebihi target PAD yang di anggarkan sebesar Rp. 40.000.000,00), Auditorium Gedung Kesenian sebesar Rp. 35.000.000,00 atau 140,00 % (melebihi target PAD yang di anggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 Adapun pendapatan yang didapat dari Retribusi Sewa Papan Billboard sebesar Rp. 4.500.000,00. Sedangkan *Lain-lain PAD yang Sah – LO* terjadi penurunan Rp. 6.525.567,00 dari TA.2023 sebesar Rp. 30.070.201,00 sekitar Rp. (23.544.634,00) atau 21,70 %. Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp. 6.525.567,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Non ASN sebesar Rp. 2.463.567,00, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Terhadap Pekerjaan Kegiatan yang tidak di dukung dengan ADDENDUM Kontrak sebesar Rp. 1.962.000,00 dan Pengembalian Sesuai Daftar Temuan Inspektorat No. 11 Hal. 68 Tahun 2023 Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp. 2.100.000,00).

Menurut bapak Anto selaku staf keuangan mengatakan bahwa proses penyusunan laporan realisasi anggaran mengalami penurunan di sebabkan karena terdapat kendala pada pendapatan daerah yang tidak tercapai dan kebanyakan di tahun 2023 belanja yang tidak terealisasi. Selain itu juga terdapat kendala seperti proses SPD terlambat melakukan laporan.

e. Penerapan PSAP Nomor 04 Catatan Atas Laporan (CALK)

PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 04 mengatur tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam konteks akuntansi pemerintahan di Indonesia. PSAP ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi entitas pemerintah dalam menyusun catatan yang menyertai laporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan transparan kepada pengguna laporan.

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- h. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Adapun beberapa dokumen-dokumen terkait dalam penyusunan CALK adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan
2. Buku pembantu dan Jurnal
3. Dokumen Pendukung Transaksi

Menilai penerapan PSAP Nomor 04 di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilihat proses penyusunan laporan, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk menyusun catatan laporan keuangan dan seberapa sering laporan tersebut diperbarui. Keterlibatan staf juga menjadi faktor kunci; apakah mereka mendapatkan pelatihan yang memadai untuk memahami dan menerapkan PSAP Nomor 04. Sesuai hasil wawancara ibu Ani menyatakan bahwa terdapat pelatihan yang khusus mengenai pengenalan PSAP Nomor 04 untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf dalam menyusun catatan atas laporan keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memahami standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan akuntansi, prosedur penyusunan laporan, serta pentingnya catatan yang akurat dan relevan. Selain itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan harus mendukung penyusunan laporan yang sesuai dengan standar, dan pengendalian internal perlu diterapkan untuk memastikan akurasi laporan.

f. Koordinasi Pelaporan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Koordinasi antar bidang dalam Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan komprehensif. Proses koordinasi dimulai dengan penetapan tanggung jawab masing-masing bidang, di mana setiap bidang memiliki peran spesifik dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Misalnya, bidang yang menangani keuangan bertanggung jawab untuk menyediakan data anggaran dan realisasi, sementara bidang yang berfokus pada program kebudayaan dan pariwisata memberikan informasi terkait kegiatan dan pencapaian yang relevan.

Untuk mendukung koordinasi ini, Dinas biasanya mengadakan rapat rutin antar bidang, di mana setiap bidang dapat melaporkan perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan CALK. Selain itu, penggunaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi juga membantu memfasilitasi pertukaran data dan informasi secara efisien. Dengan adanya komunikasi yang baik dan kolaborasi antar bidang, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dapat menyusun CALK yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kinerja keuangan dan program yang telah dilaksanakan. Hal ini pada gilirannya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

g. Langkah-langkah penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan akurat dan relevan. Sesuai dari hasil wawancara Bapak Anto mengatakan bahwa informasi yang di sajikan dalam CALK telah akurat dan relevan. Karena telah mengikuti langkah peting dalam penyusunan CALK seperti:

- a. menerapkan kebijakan akuntansi yang jelas dan konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan,
- b. melakukan verifikasi data secara menyeluruh sebelum informasi dimasukkan ke dalam CALK,
- c. Pelatihan dan pengembangan kapasitas staf juga sangat penting.

h. Tantangan Dalam Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Penerapan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi beberapa tantangan seperti pengelolaan dana hibah dan kegiatan pariwisata, yang membuat penyusunan laporan menjadi lebih rumit. Di samping itu, kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan publik menjadi tantangan tersendiri. Selain itu anggaran juga merupakan salah satu tantangan dalam menerapkan CALK sehingga bisa menghambat kegiatan seperti pelatihan pegawai.

i. Perbedaan Pendapat dan Ketidaksesuaian data dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Dalam pelaporan CALK adakalanya terjadi ketidak sesuaian dan perbedaan pendapat dalam hal ini sesuai hasil wawancara ibu Ani mengatakan bahwa, menangani perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian data dalam

menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan bisa dilakukan dengan beberapa langkah sederhana. Pertama, perlunya mencari tahu dari mana perbedaan pendapat atau data yang tidak cocok itu berasal. Apakah karena cara pandang yang berbeda, metode pengumpulan data yang tidak sama, atau faktor lain. Setelah itu, penting untuk mengajak semua pihak yang terlibat, seperti tim keuangan dan auditor, untuk berdiskusi bersama. Dalam diskusi ini, bisa saling menjelaskan pandangan masing-masing dan mencari titik temu. Menggunakan data yang akurat dan merujuk pada peraturan yang jelas juga sangat membantu untuk mendukung argumen masing-masing. Selain itu, mencatat semua proses dan keputusan dengan baik akan membuat semuanya lebih transparan dan dapat dipercaya. Jika masih ada perbedaan yang sulit diselesaikan, maka dari itu boleh meminta pendapat dari pihak ketiga yang netral.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Penerapan PSAP Nomor 02 laporan terhadap realisasi anggaran (LRA) pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa: Dinas ini telah menyusun LRA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan PSAP No. 02 laporan realisasi anggaran yang disajikan mencakup informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya. Meskipun LRA disusun dengan baik dan tepat waktu, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakcapaian pendapatan daerah dan belanja yang tidak terealisasi, yang berdampak pada proses penyusunan laporan. Pada penerapan PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya untuk menyusun CALK dengan baik, mengikuti pedoman yang ditetapkan. Namun, masih menghadapi tantangan seperti ketidakcapaian pendapatan, belanja yang tidak terealisasi, dan perbedaan pendapat dalam penyusunan CALK.

Referensi

1. Amin, A., & Anwar, A. (2020). Dimensi Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 223–230. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.223-230>
2. Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
3. Dahlia, Denofriza, Z., & Melda. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Jingga Batik Bukittinggi. *JAKSyA: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 76–102.
4. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
5. Halim, A., & Abdullah, S. (2020). "Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Implementasi". Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
6. Harefa, T. (2013). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1–19.
7. Jusmani, J., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 199–212. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7862>
8. Kapantow, E. S. K., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 494–505. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48676>
9. Lomban, P. V., Gamaliel, H., & Datu, C. (2024). *Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara*. 1(9), 1012–1018.
10. Malahati, F., B. A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
11. Mutiara, Y. C., Dethan, M. A., & Tamen, N. (2022). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(7), 582–591. <https://doi.org/10.55904/nautical.v1i7.415>
12. Nendher, J. C. T., Manossoh, H., & Afandi, D. (2022). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No . 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mongondow. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 449–460. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/42370>
13. Nizar Reza Fachruddin. (2012). *Analisis Perbandingan Psap No. 4 Catatan Atas Laporan Keuangan Dengan Laporan Keuangan Kpp Bea Cukai*. 4, 1–16.
14. Nurul Rahmi Sandya. (2018). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nommor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggahrn Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara*. 5.
15. Pangalila, B. R., Pangemanan, S. S., Warongan, J. D. L., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 234–246.
16. Rahmawati, Y., & Dwi Puspita, A. (2022). Metode Pencatatan Dan Pengaruhnya Pada Laporan Keuangan. *Journal Of Economic And Business Retail*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.69769/jebr.v1i2.39>
17. Risal, M. (2023). 734-Article Text-4104-1-10-20230525. 3(5), 419–425.
18. Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>

19. Shandi, I. F. A. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 92.
20. Sinaga, J. (2005). Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1(2),
21. Wijaya. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga
22. Yalabi, D. A. (2021). Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Components of Local Government Financial Reports. *Pitis AKP*, 1–7.
23. Yusuf, A. A., & Nurhayati, N. (2017). Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis dan Accrual Basis Pada Transaksi-transaksi di Bank Syariah. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1371>